

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MASYARAKAT DI KECAMATAN TUMINTING KOTA MANADO

MARIYATI ENDAH LESTARI ASTONO
MARTHA OGOTAN
BURHANUDDIN KIYAI

ABSTRACT: *The implementation of small business empowerment policies is one of the implementation of programs/activities carried out and managed by the Office of Cooperatives and Small Medium Empowerments to help small business actors to develop business run by small business actors. Empowerment of small businesses is an effort to prosper the community with the implementation of socialization, programs, and small business trainings in order to prosper the economy of the small business community. Based on the results of the research carried out by the authors at the Cooperative and Small Medium Empowerment agency, the program has been in the form of socialization and training on small business empowerment and several programs have been realized, although not all small business actors have not participated in the activity due to lack of information about small business empowerment. This study uses a qualitative approach. The data analyzed is based on the results of interviews with the Office of Cooperatives and SMEs as well as the community of small businesses, observations or direct observations both at the Office of Cooperatives and Small Medium Empowerments in Tuminting District, Manado City. By using four indicators, namely Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of small business empowerment policies has not been effective, because there are still constraints in the form of limited communication between implementors and small business actors, lack of mastery of science and technology, and lack of management management, and capital issues. Based on the conclusions the authors suggest that the government pay more attention to existing constraints or problems that occur in the empowerment of small business communities.*

Keyword : *Implementation, Policy, Empowerment, Small Business*

PENDAHULUAN

Usaha kecil sebagaimana yang diketahui dapat membantu perekonomian masyarakat menuju pembangunan ekonomi yang lebih baik dalam artian dapat membantu perkembangan ekonomi ditengah persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jumlah usaha kecil di Indonesia sangat besar. Usaha kecil berperan penting dalam pembangunan ekonomi yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Saat ini usaha kecil dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian negara, yang tidak mudah hancur oleh resesi ekonomi. Dilihat dari potensi yang ada di Kecamatan Tuminting masih diperlukan perubahan dalam daya berpikir masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, yaitu dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Salah satu sektor yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya

pemberdayaan usaha kecil. Disamping sebagai mata pencaharian masyarakat, dengan adanya pemberdayaan usaha kecil untuk menciptakan lapangan pekerjaan angka pengangguran dapat diminimalisir. Adapun peningkatan perekonomian masyarakat tentunya tidak lepas dari campur tangan pemerintah lewat adanya Dinas Koperasi dan UKM. Dari Dinas Koperasi dan UKM Manado, setiap tahunnya mengadakan program sosialisasi dan bimbingan teknis untuk para pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kota Manado. Program-program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat pelaku Usaha Kecil dalam menjalankan usahanya. Selain itu, diadakan pula pelatihan-pelatihan berupa pelatihan kewirausahaan, pelatihan industri dan rumah tangga, pelatihan pengelolaan keuangan, dan pelatihan mengenai HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dalam artian mempatenkan suatu produk. Program-program tersebut merupakan program jangka panjang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan UKM yang tangguh/mandiri dan berdaya saing tinggi.

Program tersebut juga dapat membantu para pelaku usaha kecil dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih kreatif dan inovatif agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara optimal. Terdapat sepuluh kelurahan di Kecamatan Tuminting, yaitu Kelurahan Karangria, Kampung Islam, Kelurahan Maasing, Kelurahan Mahawu, Kelurahan Sindulang I, Kelurahan Sindulang II, Kelurahan Tuminting, Kelurahan Sumompo, Kelurahan Tumumpa I, Kelurahan Tumumpa II. Masing-masing kelurahan memiliki usaha kecil dengan jenis wirausaha yaitu, toko, warung, rumah makan cepat saji. Keberadaan usaha kecil di Kecamatan cukup strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa usaha kecil masyarakat mampu menjadi tolak ukur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun beberapa pelaku usaha kecil mengeluhkan adanya mini market-mini market yang jumlahnya banyak sehingga para pembeli cenderung memilih pergi ke mini market dibandingkan ke warung-warung. Hal ini dinilai merugikan para pelaku usaha kecil. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat belum mampu bersaing dengan pelaku usaha yang lebih besar, sehingga adanya pesimisme dari pelaku usaha kecil yang merasa usahanya tidak akan lebih baik sejak munculnya mini market. Selain hal tersebut, adapula permasalahan lainnya, yaitu, ada begitu banyak pelaku usaha kecil di Kecamatan Tuminting, tetapi sangat disayangkan hanya beberapa saja yang mendaftarkan usahanya sebagai wirausaha dengan kata lain pelaku usaha kecil. Pelaku usaha kecil yang tidak mendaftarkan usahanya akan sulit mendapatkan informasi mengenai program-program atau kebijakan-kebijakan apa saja yang akan dilakukan oleh dinas terkait untuk mengembangkan usaha kecil. Walaupun keberadaan usaha kecil di Tuminting sudah cukup baik namun masih saja ditemui permasalahan-permasalahan dalam pengembangan usaha kecil. Pemberdayaan usaha kecil tentunya tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku usaha kecil. Rendahnya kualitas sumber daya manusia serta kurangnya pendidikan formal, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan akan mempengaruhi manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha yang dijalani sulit berkembang secara

optimal. Selain kurangnya kualitas sumber daya manusia, terdapat masalah lainnya berupa masalah permodalan sehingga menyebabkan usaha mereka tidak kunjung berkembang menjadi lebih besar. Kalau pun terdapat bantuan berupa modal dari Dinas Koperasi dan UKM, namun keterbatasan pencairan dana merupakan salah satu kendala yang membuat pelaku usaha kecil tidak dapat menerima bantuan tersebut. Selain itu, kurangnya pengawasan aparat pemerintah dan kurangnya pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan profesionalitas usaha kecil berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya uraian yang telah dipaparkan diatas, diharapkan agar kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah terlebih khusus oleh Dinas Koperasi dan UKM dapat berpihak kepada para pelaku usaha kecil. Dan untuk membantu para pelaku usaha diapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional lewat sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan keterampilan.
2. Usaha memperhatikan kualitas suatu produk yang dihasilkan.
3. Adanya akses penambahan modal atau pinjaman lewat koperasi atau perbankan untuk menambah modal untuk pelaku usaha kecil.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Tahir Arifin (2014), menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan upaya melakukan, mencapai, memenuhi dan menghasilkan. Sedangkan menurut Wahab dalam Tahir (2014) mengatakan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok maupun pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan

Geroge C. Edward (dalam Budi Winarno (2016:155-176) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Ada pula empat indikator

implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu:

1. Komunikasi. Menurut Edward persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personel yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti.
2. Sumber-Sumber Daya. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.
3. Disposisi. Sikap dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
4. Struktur Birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standar Operating Procedures (SOP)*.

Konsep Pemberdayaan

Sumodiningrat dan Ari Wulandari (2015:20), mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh; suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan,

pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Menurut Swift dan Levin dalam Theresia (2014:116-117), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk:

1. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
2. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Konsep Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, Usaha Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana di atar dalam undang-undang ini.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 6, Usaha Kecil memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Yolanda CH. T. Wonok dkk (2015) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan sesuai dengan Undang-Undang No. 20. Tahun 2008 mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta dengan PP No. 13 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 maka pemerintah membuat

kebijakan mengenai program-program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah pemerintah memberikan izin usaha bagi para pelaku usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu; pengembangan usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan; bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya asing usaha; adanya koordinasi dan pengendalian dari pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Kawangkoan Utara sudah cukup efektif. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka disarankan kepada pemerintah, untuk lebih memperhatikan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian. Dimana maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami masyarakat sebagai suatu subyek penelitian.

FOKUS PENELITIAN

Adapun fokus penelitian yaitu mengkaji dan menganalisis tentang implemetasi kebijakan pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan menggunakan teori dari George Edward III, yaitu: Komunikasi, Sumber-Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator-indikator implementasi kebijakan pemberdayaan usaha kecil yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Berikut ini hasil analisis peneliti dengan menyesuaikan beberapa teori yang menyangkut dengan indikator penelitian :

Komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu pelatihan serta sosialisasi mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan usaha kecil oleh pihak pelaksana kebijakan yakni Dinas Koperasi

dan UKM kepada masyarakat. Dengan menganalisa hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa komunikasi antara pihak pelaksana dan pelaku usaha kecil di Kecamatan Tuminting masih kurang efektif dikarenakan tidak semua masyarakat pelaku usaha kecil tidak mendapatkan informasi mengenai program atau sosialisasi pemberdayaan usaha kecil. Sumber daya hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya manusia belum efektif Hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak efektif karena masih terdapat berbagai kendala dari segi sumber daya manusia, kurangnya penguasaan IPTEK, penguasaan management, dan dari aspek sumber daya finansial tidak cukup baik dikarenakan modal pelaku usaha kecil yang masih minim Perilaku dan karakteristik pelaksana kebijakan berperan penting dalam implementasi kebijakan. Karakter penting untuk dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran dan komitmen yang tinggi. Hasil penelitian melalui observasi dari peneliti, peneliti menemukan bahwa perilaku dan karakteristik pelaksana kebijakan memiliki sifat baik dan semangat yang tinggi dalam pengabdian mengimplementasikan kebijakan. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Hasil penelitian melalui observasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado memiliki aturan yang jelas dalam mengatur tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan yang ada untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawabnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : Dari segi komunikasi belum efektif karena masih ada beberapa pelaku usaha kecil yang tidak tahu jika ada sosialisasi atau pelatihan mengenai pemberdayaan usaha kecil. Dari segi sumber daya implementasi kebijakan belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan dimana kurangnya penguasaan IPTEK dari pelaku usaha kecil, kurangnya pengelolaan manajemen, dan

cenderung kekurangan modal. Dari segi permodalan dinas terkait menjelaskan bahwa telah memfasilitasi pihak UKM agar dapat bermitra dengan BUMN dan Perbankan agar dapat menambah modal bagi para pelaku usaha. keadaan tersebut dapat mematikan mata pencaharian. Dari segi disposisi, sikap dan karakteristik implementor sudah baik, yaitu dimana implementor telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam membuka izin usaha. Salah satu contohnya dengan memberi kemudahan untuk UKM dalam mendaftarkan usahanya, membantu UKM agar dapat menyetok usaha dagangnya ke ritel yang lebih besar. Struktur Birokrasi sudah baik. Setiap implementor sudah mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengemukakan beberapa saran: Peran Dinas Koperasi dan UKM sangat besar dalam hal memberikan informasi untuk pelaku usaha kecil. Saran dari penulis, yaitu diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah yang ada di kelurahan-kelurahan dan Dinas Koperasi dan UKM untuk memberikan sosialisasi atau pemberitahuan mengenai adanya program-program atau pelatihan-pelatihan mengenai pemberdayaan usaha kecil kepada para pelaku usaha kecil. Dari aspek sumber-sumber daya, peneliti menyarankan kepada Dinas Koperasi dan UKM agar melaksanakan program atau pelatihan mengenai penguasaan IPTEK, penguasaan manajemen, dan membantu pelaku usaha kecil agar dapat bermitra dengan perbankan ataupun BUMN supaya bisa

bekerjasama dengan pelaku usaha kecil. Peran pemerintah tentunya sangat berpengaruh bagi masyarakat khususnya untuk para pelaku usaha kecil. Adapun karakteristik dan perilaku yang baik dari pelaksana kebijakan sudah baik. Tetap dipertahankan. Dari struktur birokrasi peneliti menyarankan agar pemerintah maupun Dinas Koperasi dan UKM tetap mempertahankan kinerja sesuai dengan standar operasional prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumodiningrat, G, Ari, W. 2015. *Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan UMKM Dengan Konsep OPOP-OVOP-OVOC*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Theresia, A. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi T Kasus Komparatif*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Yolanda Ch. T. Wonok. Femmy Tulusan. Joorie Ruru. 2015. *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Suatu Studi di Kecamatan Kawangkoan Utara)*. Dalam Jurnal UNSRAT No. 31 Vol III